



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ragam Syarat Calon Kepala Daerah Diuji ke Mahkamah Konstitusi

**Jakarta, 12 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap tiga permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Jumat (12/7) pukul 09.30 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 70/PUU-XXII/2024 diajukan oleh dua orang mahasiswa bernama A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, sedangkan permohonan dengan nomor perkara 71/PUU-XXII/2024 oleh perorangan bernama Isdianto yang saat ini berprofesi sebagai wiraswasta. Selanjutnya, permohonan dengan nomor perkara 72/PUU-XXII/2024 diajukan oleh seorang pegawai bernama Zulferinanda. Tiap permohonan mempersoalkan norma Pasal 7 ayat (2) yang mengatur syarat calon kepala daerah.

Masing-masing Pemohon mempersoalkan norma Pasal 7 ayat (2) huruf berikut.

Perkara 70/PUU-XXII/2024	<b>Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016</b> <i>e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota</i>
Perkara 71/PUU-XXII/2024	<b>Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016</b> <i>o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;</i>
Perkara 72/PUU-XXII/2024	<b>Pasal 7 ayat (2) huruf c, e, n UU 10/2016</b> <i>c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;</i> <i>f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota</i> <i>n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;</i>

Secara khusus, Pemohon Perkara 71 berpandangan bahwa MK perlu menafsirkan ketentuan belum pernah menjabat menjadi belum pernah menjabat pada satu periode masa jabatan. Hal ini disampaikan Pemohon Perkara 71 karena pengalamannya menjabat sebagai Plt Gubernur Kepulauan Riau hingga menjadi Gubernur Definitif Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yang diakibatkan operasi tangkap tangan terhadap gubernur sebelumnya.

Adapun para Pemohon Perkara 72 memohon kepada MK agar syarat pendidikan paling rendah yang diatur dalam UU *a quo* menjadi sarjana atau sederajat, dan syarat usia dari 25 tahun menjadi 30 tahun untuk seluruh calon kepala daerah. Para Pemohon berkeyakinan bahwa calon-calon dengan gelar sarjana lazimnya memiliki pola pikir yang lebih luas dan bervisi memajukan pendidikan berbasis penelitian dan teknologi. Mengenai syarat usia, para Pemohon berpandangan bahwa usia 25-30 tahun belum tepat untuk memimpin [orang lain] karena masih berfokus memimpin dirinya sendiri.

Terakhir, terhadap ketentuan belum pernah menjabat selama 2 kali dalam jabatan yang sama, MK diharapkan menyatakan pasal yang mengaturnya bertentangan dengan UUD 1945 serta menghapus frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan”. Hal ini diminta Pemohon karena kekuasaan yang terlalu lama diyakini berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)